

**DAMPAK PEMBANGUNAN
PABRIK BATU GAMPING TERHADAP
LINGKUNGAN WARGA DESA SAMPUNG**

(Studi Kasus di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo)

Skripsi :

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) Dalam Ilmu Filsafat Politik Islam



Oleh :

BAGAS TOMY DWI PROBOSUTEDJO

E74213130

PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Bagas Tomy Dwi Probosutedjo* ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP.198401052011011008

PENGESAHAN SKRIPSI

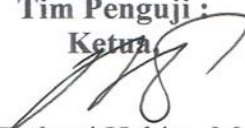
Skripsi oleh *Bagas Tomy Dwi Probosutedjo* ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 03 Agustus 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,




Dr. Soehermanto, M.Hum
NIP. 196708201995031001

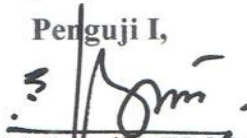
Tim Penguji :
Ketua


M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008


Sekretaris,


Zaky Ismail, M.Si
NIP. 198212302011011007

Penguji I,


Dr. HM. Ismail MH, M.Si
NIP. 196005211986081001

Penguji II,


Holilah, S.Ag. M.Si
NIP. 197610182008012008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Bagas Tomy Dwi Probosutedjo

NIM : E74213130

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil

penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk

sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2018



Bagas Tomy Dwi Probosutedjo
NIM. E74213130



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagas Tomy Dwi Probosutedjo
NIM : E74213130
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Filsafat Politik Islam
E-mail address : bagastomy95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
DAMPAK PEMBANGUNAN PABRIK BATU GAMPING TERHADAP LINGKUNGAN
WARGA DESA SAMPUNG (Studi Kasus di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten
Ponorogo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(Bagas Tomy Dwi Probosutedjo)
nama terang dan tanda tangan

seperti pencemarnya sumber air, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan air oleh warga desa Sampung, kemudian menurunnya kualitas udara yang dihirup oleh warga desa Sampung, serta kerusakan lingkungan lain yang pada akhirnya menurunkan kualitas kesehatan dari Desa Sampung yang diakibatkan oleh beroperasinya Pabrik batu gamping.

Kerusakan lingkungan sebenarnya telah dicegah dengan program pengolahan lingkungan hidup, Pengelolaan lingkungan hidup sendiri diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. SDA seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, SDA ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan SDA tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan SDA, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, dan sebagainya.

Pada era otonomi daerah sekarang pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
3. Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
4. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Program dan kegiatan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup seharusnya didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup. Diakui atau tidak, seiring agenda industrialisasi di banyak negara, isu lingkungan hidup juga semakin sering muncul sebagai bahan pembahasan. Bukan hanya di negara-negara dunia pertama, isu lingkungan hidup juga menjadi kajian yang cukup serius di negara-negara dunia ketiga. Indonesia salah satunya.

Sebagaimana data yang dirilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) perusahaan (industri) acapkali menjadi aktor utama di balik pencemaran lingkungan. Secara rinci, dalam sebuah kesempatan, WALHI menyebut bahwa 84 persen pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan adalah perusahaan dan negara

industrialisasi ini percaya tidak hanya akan meningkatkan pendapatan nasional, namun juga dapat menjadi cara dalam membantu negara mewujudkan masyarakat yang produktif, dikarenakan PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) dapat menyerap tenaga produksi dari warga sekitar desa Lakardowo Kecamatan Jetis. Hal tersebut kemudian di sampaikan pula oleh salah satu warga masyarakat desa Lakardowo yang juga memperoleh manfaat ekonomis, dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di desa Lakardowo, manfaat ekonomis tersebut di dapatkan oleh sebagian masyarakat, namun sebagian masyarakat lain tidak mendapatkannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada bidang pengolahan limbah dengan area pelayanan sekitar Jawa Timur hingga Jawa Barat. Proses industrialisasi yang dilakukan oleh PT PRIA memiliki beberapa kejanggalaan kemudian dalam prosesnya juga menyebabkan banyak dampak seperti Menurunnya kualitas air bawah tanah di desa Lakardowo, Menurunnya kualitas udara bersih, Menurunnya kualitas dan kuantitas dari hasil petani di desa Lakardowo, dan Timbulnya berbagai keluhan penyakit pada warga Desa Lakardowo. dan kemudian Berkurangnya tingkat kebersihan lingkungan.

Temuan selanjutnya adalah adanya konflik sosial yang terjadi diantara masyarakat warga desa Lakardowo yaitu, Konflik dalam bidang keagamaan, Kelompok dalam bidang Pendidikan, Konflik antar saudara sekandung, Konflik dalam bidang percintaan dan Konflik antar kepentingan warga.

Pada penelitian diatas memiliki kesamaan dan perbedaan konsep dengan penelitian ini, kesamaan tersebut terletak pada fokus penelitian yakni konflik yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Namun banyak hal yang menjadi pembeda dari kedua penelitian ini, antara lain pada penelitian diatas mengambil lokasi penelitian di dataran tinggi desa Lakardowo kecamatan Jetis, diketahui bahwa terdapat manfaat ekonomis yang diperoleh dari adanya proses industrialisasi di desa Lakardowo, selain itu terdapat beberapa dampak negative yang juga terjadi di lingkungan hidup desa Lakardowo, namun tidak dapat dirasakan secara langsung, atau dampak nya terjadi secara berkala, untuk saat ini hanya tanda tanda nya saja yang dapat di ketahui, seperti berkurangnya kualitas air bawah tanah dan lain sebagainya.

Sedangkan pada penelitian yang hendak peneliti lakukan ini mengambil lokasi penelitian di pegunungan, tepatnya di desa Sampung terdapat gunung gamping yaitu satu satunya gunung yang menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar desa Sampung. Selain itu pada penelitian ini terdapat dampak positif seperti menyerap lapangan pekerjaan, dan batu mentah cepat laku dan tidak ada musim sepi. Dampak negatif yang terjadi seperti bahan baku gamping mentah yang cepat habis karena dikeruk dengan skala besar oleh alat berat, pencemaran udara di sekitar lingkungan desa Sampung, sumber pangan/ perekonomian warga mati, sulitnya mendapatkan air bersih, pembatasan tenaga kerja. Dampak tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena pendirian pabrik gamping ini didirikan dalam waktu yang

relatif cepat sehingga dampaknya sangat dapat dirasakan dalam jangka pendek oleh masyarakat sekitar.

Perbedaan kedua adalah pada penelitian di atas terdapat adanya kejanggalan dalam proses industrialisasi yang dilakukan, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan tidak adanya kejanggalan yang dirasakan warga sekitar dikarenakan pendirian pabrik gamping ini bersifat tertutup dan tidak ingin diketahui masyarakat, sehingga masyarakat desa Sampung tidak merasakan kejanggalan sama sekali pada saat pendirian pabrik tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Supratiwi, penelitian ini membahas mengenai Penambangan Galian C Di Bukit Mangunharjo, dimana terdapat konflik Kepentingan Ekonomi dengan Kepentingan Lingkungan. Penambangan Galian C Mangunharjo, Tembalang, kota Semarang, Pengeprasan Bukit Mangunharjo tersebut mengakibatkan terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan kepentingan lingkungan. Di satu sisi masyarakat memperoleh keuntungan ekonomis dari kegiatan penambangan namun disisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; seperti rusaknya jalan, polusi (debu) maupun rawan terjadinya longsor dan banjir. Padahal daerah Tembalang oleh pemerintah kota sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi (resapan air) yang seharusnya tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penambangan galian C di bukit Mangunharjo kecamatan Tembalang kota Semarang telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan

sebagian masyarakat. Adapun dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan, seperti terjadinya longsor, banjir, pencemaran udara, keringnya sumber mata air, gersang, dan sebagainya.

Temuan selanjutnya adalah adanya dampak positif dan negatif dari penambangan tersebut menyebabkan terjadinya konflik kepentingan; yaitu antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Kepentingan ekonomi diwakili oleh sebagian masyarakat, diantaranya pemilik lahan, para pekerja, serta masyarakat sekitar. Sedangkan kepentingan lingkungan diwakili oleh pemerintah kota dan masyarakat pada umumnya.

Sumber konflik dari permasalahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 tersebut adalah ketiadaan dan ketidakjelasan peraturan, ketidaktegasan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran dan kephahaman masyarakat tentang lingkungan hidup.

Pada penelitian diatas memiliki kesamaan dan perbedaan konsep dengan penelitian ini, kesamaan tersebut terletak pada fokus penelitian yakni konflik lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat, dan pemicu dari konflik tersebut adalah sama-sama menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yang diakibatkan dari proses penambangan.

Namun banyak hal yang menjadi pembeda dari kedua penelitian ini, antara lain pada penelitian diatas mengambil lokasi penelitian di daerah bukit, tepatnya di bukit mangunharga. Temuan selanjutnya adalah adanya dampak positif dan negatif dari penambangan tersebut menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yaitu antara

kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Kepentingan ekonomi diwakili oleh sebagian masyarakat, diantaranya pemilik lahan, para pekerja, serta masyarakat sekitar. Sedangkan kepentingan lingkungan diwakili oleh pemerintah kota dan masyarakat pada umumnya. Sumber konflik dari permasalahan sudah berlangsung sejak tahun 2008. Pada konflik ini tidak menimbulkan aksi demo, tetapi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengambil lokasi penelitian di daerah pegunungan, yaitu gunung gamping di Desa Sampung. Adanya dampak positif maupun dampak negatif tersebut menyebabkan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat desa seperti Ketua RT04/RW04 desa Sampung, dan masyarakat pada umumnya, sedangkan pemerintah kota tidak ikut serta dalam mengatasi konflik di desa Sampung ini. Perbedaan lain dalam penelitian ini adalah sumber konflik dari permasalahan pembangunan pabrik gamping ini berlangsung tidak memakan waktu lama karena pabrik gamping tersebut didirikan dalam waktu yang relatif cepat sehingga dalam jangka pendek menimbulkan konflik dari warga yang menolak pendirian pabrik gamping dikarenakan pabrik gamping tersebut tidak memiliki izin dan hanya dimiliki oleh badan perseorangan. Pada penelitian ini reaksi warga Sampung menolak dengan melakukan aksi demo yang diikuti oleh seluruh warga desa Sampung di depan kantor Pemkab. Ponorogo.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kiki Riski Desianti (2012) yang berjudul Dampak Pertambangan Pasir pada Lingkungan Sosial Ekonomi masyarakat di desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Penelitian ini

dilatarbelakangi oleh permasalahan pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan pertambangan yang tidak tepat guna dan tidak berwawasan lingkungan menyebabkan terjadinya dampak sosial maupun ekonomi khususnya bagi masyarakat di desa Pancanegara.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa, dilihat dari dampak sosial pertambangan pasir di Desa Pancanegara membuka lapangan pekerjaan baru bagi 350 orang masyarakat lokal dan juga berkontribusi melalui program CSR yang diberikan langsung kepada masyarakat sekitar. Namun keuntungan tersebut jauh dibandingkan dengan kerugian berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara, dan kerusakan alam yang dialami oleh daerah terbukti dari adanya pencemaran sungai Cibanten akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif, selain itu penggunaan alat berat untuk melakukan eksploitasi sumber kekayaan alam tersebut, mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja semakin kecil. Artinya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit, sehingga kesejahteraan rakyat yang meningkat hanya sedikit yakni hanya yang bekerja di wilayah pertambangan pasir tersebut. Pendapatan juga terbantu dengan adanya sistem sewa tanah milik penduduk sekitar pertambangan yang kerap disewakan kepada produsen atau pemilik proyek sebagai mess pegawai, dan merangsang pula tumbuhnya berbagai usaha kecil warga setempat terutama pada sektor perdagangan barang-barang konsumsi maupun jasa seperti warung, warung nasi, jasa transportasi ojek dan lain-lain.

Pada penelitian diatas juga memiliki beberapa kesamaan dengan konsep penelitian yang hendak peneliti lakukan, yaitu sama sama membahas tentang

pencemaran lingkungan. Namun banyak hal yang menjadi pembeda dari kedua penelitian ini, antara lain pada penelitian di atas pencemaran lingkungan diakibatkan oleh Pertambangan pasir di desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Sedangkan konsep penelitian yang hendak peneliti lakukan membahas tentang dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Penambangan batu gamping di desa Sampung. Pada penelitian di atas dampak sosial pertambangan pasir di Desa Pancanegara membuka lapangan pekerjaan baru bagi 350 orang masyarakat lokal dan juga berkontribusi melalui program CSR yang diberikan langsung kepada masyarakat sekitar. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan pertambangan batu gamping di desa Sampung menyerap lapangan pekerjaan hanya 15 orang artinya tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit, sehingga kesejahteraan rakyat yang meningkat hanya sedikit yakni hanya yang bekerja di wilayah pertambangan pasir tersebut. Pada penelitian di atas pendapatan warga terbantu dengan adanya sistem sewa tanah milik penduduk sekitar pertambangan yang kerap disewakan kepada produsen atau pemilik proyek sebagai mess pegawai, dan merangsang pula tumbuhnya berbagai usaha kecil warga setempat terutama pada sektor perdagangan barang-barang konsumsi maupun jasa seperti warung, warung nasi, jasa transportasi ojek dan lain-lain. Sedangkan pada penelitian yang diteliti pendapatan masyarakat desa Sampung berkurang karena adanya pabrik gamping tersebut, dan pasar tradisional mati karena warga tidak mempunyai pendapatan sebagai penambang tradisional, karena dengan adanya pabrik warga tidak bisa bekerja sebagai penambang tradisional dan dialihkan dengan mesin modern.

untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yang artinya penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di Desa Sampung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi di Desa Sampung Kabupaten Ponorogo karena masyarakat menolak pendirian pabrik. Dan pendirian pabrik yang di lakukan oleh pemerintah daerah juga tidak pernah mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar.

3. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang keadaan atau hal-hal yang berkaitan tentang penelitian yang berlangsung. Informan bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga sebagai aktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian berdasarkan hasil informasi yang diberikan. Sehingga antara peneliti dan informan memiliki peran dan fungsi yang kurang lebih sama, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data

masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.

Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedang sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit. Maka, dengan adanya konsep *Sustainable Development* yang kemudian disebut SD akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang. “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Brundtland Report dari PBB Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Laporan dari KTT Dunia yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang salingbergantung dan memperkuat.

tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal: ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi sumber daya alam diperbaharui dan daur ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui).

Menurut Marlina: mengatakan pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 Pilar Pembangunan berkelanjutan).

Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependensi. Yang erat kaitannya juga dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya sebuah masyarakat tetap bisa eksis untuk menjalani kehidupan serta mempunyai sampai masa mendatang. Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah a) terpeliharanya proses ekologi yang esensial, b) tersedianya sumberdaya yang cukup, dan c) lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai.

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan

kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Tujuan akhir setiap usaha pembangunan ialah memperlakukan manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak sebagai tujuan, untuk memperbaiki kondisi manusia dan memperbesar pilihan manusia. Salah satu yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan adalah dimensi manusia atau bisa juga disebut dengan 'pembangunan manusia'. Ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (*equity*), berkelanjutan, produktivitas dan pemberdayaan.

Meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju, maka generasi anak-anak kitapun minimal bisa mencapai kesejahteraan yang setingkat, demikian pula dengan cucu-cucu kita. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi. Itulah yang dimaksud dengan keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi saja ternyata tidak cukup.

dan Bailey menjelaskan bahwa ekologi politik fokus pada usaha mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Menurut Bryant asumsi pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.

Politik lingkungan hidup merupakan kajian yang membahas interaksi antar berbagai elemen sistem (*variable*) di dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik yang menuju terbentuknya *public policy* terhadap masalah-masalah lingkungan. Secara komprehensif dibahas berbagai isu krisis lingkungan, ideologi politik lingkungan, gerakan lingkungan, sistem politik, partai politik dan lingkungan, dan proses politik dan lingkungan. Singkatnya, politik lingkungan hidup secara sederhana, meminjam istilah Bryant dan Bailey dimaknai sebagai bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah-masalah lingkungan.

Politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan *rogressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini dimulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak

Politik Hijau dengan dua konsep utamanya yaitu keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*) serta desentralisasi tata kelola lingkungan, menjadikannya alternatif bagi penyelesaian masalah lingkungan yang biasanya bertumpu pada konsep pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) dan pembentukan rezim lingkungan internasional yang terbukti belum dapat menyelesaikan problem lingkungan dunia. Sementara itu R.E Goddin juga menempatkan etika pada pusat dari posisi politik Hijau. Ia menyatakan bahwa *Green Theory of Value* merupakan pusat dari teori hijau, dengan mengedepankan sumber nilai sebagai fakta dari sesuatu yang dibentuk oleh proses alamiah sejarah, dan lebih daripada sekedar peran manusia. Lain lagi dengan John Barry, dia melihat bahwa Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama, antara lain:

1. Sebuah teori distribusi (*intergerenasional*) keadilan.
2. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi.
3. Usaha untuk mencapai keberlanjutan ekologi.³⁸
4. Tiga prinsip utama inilah merupakan konsepsi yang mewakili makna dari pusat Politik Hijau. Prinsip ini digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan konsepsi dari teori hijau.

³⁸John Barry, *Green Political Theory and The State ,Discursive Sustainability; The State (and citizen) of Green Political Theory*, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf> pada tanggal 7 april 2017

Politik Hijau menawarkan konsep desentralisasi sebagai implementasi kontrol yang lebih baik dalam mengatasi kontrol level global dapat lebih efektif dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil, yakni skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar dalam kehidupan mereka. Dengan konsep itu, selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green politics bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan.

Gerakan lingkungan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk aksi kesadaran manusia yang peduli terhadap kerusakan lingkungan, serta berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang terancam akibat kerusakan lingkungan. Dua terminologi yang erat kaitannya dengan gerakan lingkungan adalah konservasi dan “gerakan hijau” (*Green movement*). Teori Politik Hijau (*Green political theory*) adalah khusus diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki implikasi bagi teori politik.

Dengan demikian manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalism) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisisme) akan tetapi sebagai natural beings, dan lebih jauh sebagai political animals. Sedangkan perlu untuk membedakan antara green politics dan *environmentalism*. *Environmentalists* menerima kerangka kerja yang ada dalam politik, sosial, ekonomi dan struktur normatif dalam dunia politik dan mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang ada tersebut.

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerana ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.⁵¹

⁵¹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan GejalaPermasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011), hal 361.

ketidak bebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi lain.

Kekuasaan dan wewenang seantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai: persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain :

1. Kelompok Semu (*quasi group*) 2. Kelompok Kepentingan (*manifes*) 3. Kelompok Konflik

Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba.

Menurut Dahrendorf, Adanya status sosial didalam masyarakat (sumber konflik yaitu: Adanya benturan kaya- miskin, pejabat-pegawai

Pabrik gamping ini berdiri tidak menggunakan nama badan usaha dan bersifat tertutup. Pendirian pabrik gamping ini juga tidak mendapatkan izin pembangunan, seperti izin AMDAL, ijin HO (surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat), izin dinas sosial terkait, karena pabrik ini didirikan oleh badan usaha perseorangan sehingga bersifat illegal dan tertutup. Alasan didirikannya pabrik ini adalah Pemda harus mendapatkan pemasukan PAD dari sektor tambang karena selama ini hanya mendapat masukan 9 juta per tahun, oleh sebab itu Pemda tetap nekad menggali tambang karena untuk memenuhi jatah pabrikan. Hal tersebut menjadi ancaman bagi warga sekitar dikarenakan dengan adanya pembangunan pabrik penggilingan batu gamping tersebut dapat mematikan mata pencaharian mereka yang sebelumnya melakukan penambangan dengan tradisional kini beralih menggunakan alat berat untuk modernisasi pada gunung gamping tersebut.

Berikut bagan/struktur yang didapat dari wawancara oleh pekerja/buruh yang pernah bekerja di pabrik tersebut yaitu Pak Boiman dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut :

letaknya paling barat dan jauh dari pusat kota Ponorogo. Kondisi lingkungan di Desa Sampung sebelum adanya pembangunan Pabrik batu gamping ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari hasil wawancara oleh Tokoh masyarakat yaitu Ketua RT 03/RW04 Bapak Sidul di peroleh hasil :

- a. Suhu udara yang ada di wilayah desa Sampung Ponorogo masih terbilang asri karena masih banyak tumbuhan dan ekosistem alam yang masih terjaga. Didukung dengan banyaknya tanaman yang warga desa tanam yang menyumbang banyak oksigen disekitar desa, hal tersebut dibuktikan pula dengan pernyataan warga bahwa hampir seluruh warga tidak ada yang memiliki riwayat sakit pernafasan seperti asma dan lain sebagainya.
- b. Air yang mudah di dapat karena sekitar lingkungan ditanami tumbuhan dan melestarikan hutan yang dibuat oleh warga sekitar sehingga cadangan air mudah didapat. Karena hutan adalah tempat penyimpanan air.
- c. Perekonomian warga stabil dibuktikan dengan adanya tambang tradisional yang diambil dari gunung gamping yang sudah ada sejak berabad abad yang lalu dan tidak akan habis.
- d. Mata pencaharian warga setempat pada penambangan tradisional berjalan baik.

- c. Pencemaran udara, dengan berdirinya pabrik tersebut udara di sekitar lingkungan menjadi tercemar akibat debu dari batu gamping tersebut yang dikeruk dengan skala besar. Selain itu pencemaran udara dari aktivitas transportasi pengangkutan batu kapur yang hilir mudik. Pencemaran udara ini sangat merugikan kesehatan masyarakat dan dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA).
- d. Rusaknya akses jalan di Kecamatan Sampung khususnya jalan menuju pertambangan, karena aktivitas transportasi truk yang mengangkut batu gamping mentah maupun yang sudah matang.
- e. Hilangnya sumber mata pencaharian warga desa yang sebelumnya melakukan penambangan dengan cara tradisional, dengan berdirinya pembangunan pabrik gamping beralih menggunakan mesin modern dan alat berat yang lebih canggih.

Rumusan masalah yang pertama, peneliti menggunakan menggunakan teori Politik Hijau (*Green Politik*) dalam menganalisis data yang telah ditemukan, konsep tersebut dijadikan sebagai pisau analisis oleh peneliti untuk memudahkan dalam menganalisa data yang muncul dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorfer terkait dinamika konflik yang muncul antara warga dan pelaku industri di desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Berikut akan dipaparkan hasil penelitian beserta analisisnya:

A. Dampak Pembangunan Pabrik Batu Gamping di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Pada saat pendirian pabrik gamping ada beberapa dampak yang terjadi seperti yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu ketua RT03/RW03 di desa Sampung yang letaknya berdekatan dengan wilayah pertambangan. Dampak yang ditimbulkan sejak pendirian pabrik tersebut diantaranya ada dampak positif yaitu didukung oleh warga desa Sampung yang setuju (pro) yaitu RT01/RW02 terhadap pendirian pabrik gamping tersebut sedangkan dampak negatif adalah dampak yang ditimbulkan dari pendirian pabrik gamping tersebut dan sebagian besar warga desa Sampung menolak (kontra) dengan adanya pabrik tersebut:

2. Sebagian besar warga desa Sampung menolak (kontra) dengan perwakilan dari warga yaituketua RT03/RW04 Bapak Sidul di desa Sampung terhadap pendirian pabrik gamping tersebut karena menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu:
 - a. Bahan baku gamping mentah yang cepat habis karena dikeruk dengan skala besar oleh alat berat.

Informasi yang diterima dari tokoh masyarakat yaitu ketua RT03/RW04 desa Sampung, Kab. Ponorogo ini adalah dampak dari pendirian pabrik tersebut diantaranya bahan baku yang dikeruk dari gunung gamping dengan skala besar akan cepat habis, sehingga tenaga kerja manusia dari masyarakat desa setempat otomatis berkurang karena beralih menggunakan mesin modern. Masyarakat warga sekitar menolak pendirian pabrik tersebut untuk dapat melestarikan penambang tradisional, sehingga perekonomian warga sekitar tetap berjalan lancar dan stabil sampai anak cucu kelak nanti. Gunung gamping di desa Sampung ini adalah satu-satunya sumber pangan dan mata pencaharian penduduk sekitar karena sebagian besar masyarakatnya tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga hanya mengadakan hasil dari pertambangan gamping tersebut, jika pendirian pabrik tersebut terus dilakukan maka sumber pendapatan masyarakat akan mati. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sidul Ketua RT 03/RW04 desa Sampung, yang menyatakan bahwa :

“Niku seng marai rugi nek di enteni pabrik gamping niku bahan baku yang cepat habis, terus tenaga manusia otomatis banyak yang berkurang. Semakin banyak alat mesin yang masuk otomatis tenaga kerja berkurang, jadi kita itu melestarikan penambang tradisional, agar perekonomian disitu ini tetap lancar sampai anak cucu,

Dari penjabaran diatas mengenai pembangunan pabrik batu gamping di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo selanjutnya akan di bahas melalui teori politi hijau.

Teori Politik Hijau menurut Andrew Dobson, yang menyatakan pendapatnya menolak pandangan *antroposentrisme* dan perlu adanya batasan pertumbuhan, yang merupakan penyebab munculnya krisis lingkungan secara alami. Pandangan Politik Hijau ini merupakan pengalaman dari pertumbuhan ekonomi secara *eksploitasi* yang merupakan penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada sekarang ini. Cara pandang *antroposentris* ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras sumber daya alam dengan sebesar-besarnya demi kelangsungan hidupnya. Pada penelitian ini pelaku industri yaitu pabrik batu gamping di desa Sampung mengeksploitasi dan menguras sumber daya alam dengan melakukan pengerukan penambangan batu gamping dengan skala besar. Cara pandang *antroposentris* inilah yang digunakan oleh Pabrik Batu Gamping dalam pelaksanaan operasionalnya.

Berikut adalah bentuk permasalahan lingkungan yang terjadi sejak berdirinya pabrik gamping di desa Sampung :

Tabel 4. 2

Bentuk permasalahan lingkungan sejak pendirian pabrik

No.	Permasalahan lingkungan	Keterangan
1.	<p>Bahan baku yang cepat habis</p>	<p>Dampak dari pendirian pabrik tersebut diantaranya bahan baku yang dikeruk dari gunung gamping dengan skala besar akan cepat habis, sehingga tenaga kerja manusia dari masyarakat desa setempat otomatis berkurang karena beralih menggunakan mesin modern. Masyarakat warga sekitar menolak pendirian pabrik tersebut untuk dapat melestarikan penambang tradisional, sehingga perekonomian warga sekitar tetap berjalan lancar dan stabil sampai anak cucu kelak nanti. Gunung gamping di desa Sampung ini adalah satu-satunya sumber pangan dan mata pencaharian penduduk sekitar karena sebagian besar masyarakatnya tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga hanya mengadakan hasil dari pertambangan gamping tersebut, jika pendirian pabrik tersebut terus dilakukan maka sumber pendapatan masyarakat akan mati.</p>
2.	<p>Pencemaran Udara</p>	<p>Dengan berdirinya pabrik gamping di desa Sampung tersebut dampak lain yang ditimbulkan adalah pencemaran / polusi udara yang disebabkan oleh pencemaran udara dari debu gamping mentah yang tidak bisa hancur. Asal gamping adalah</p>

Berbagai masalah lingkungan tersebut diatas yang terjadi di Desa Sampung dikarenakan proses pembangunan oleh Pabrik batu gamping kemudian mendukung teori Politik Hijau (*Green Politik*) yang dikemukakan oleh Dobson yang menyebutkan ada tiga argumentasi penting. Pertama adalah solusi teknologi tidak dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Solusi teknologi tidak mampu menyelesaikan krisis yang ada namun hanya mampu menunda krisis tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan kaum modernis yang menganggap bahwa solusi bagi permasalahan lingkungan adalah pengetahuan dan teknologi. Argumentasi kedua yaitu peningkatan pertumbuhan berarti penumpukan bahaya yang mampu berakhir pada bencana. Semakin cepat pertumbuhan, maka semakin sempit ruang yang ada dan kemampuan untuk menampung pertumbuhan yang semakin meningkatpun semakin berkurang. Argumentasi ketiga adalah permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan pada dasarnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Inti dari pemahaman kelompok lingkungan adalah menentang norma dan praktek ideologi dominan yaitu kapitalisme ekonomi dan asumsi dasar bahwasanya pertumbuhan ekonomi secara *eksploitasi* yang merupakan penyebab dari kerusakan lingkungan. Dalam hal ini telah dilakukan oleh Pabrik batu gamping yang melakukan berbagai aktivitas yang merugikan lingkungan, seharusnya dalam proses pembangunan tersebut terdapat

pengawasan dari berbagai pihak yang berwenang, pengawasan menjadi sesuatu yang sangat penting (*urgent*) untuk dilakukan, sebagai upaya pengendalian dalam pengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Usaha dan tindakan yang dilakukan oleh warga tentunya akan sia-sia apabila tidak didukung oleh pemerintah dan pejabat terkait untuk proses pengawasan tersebut, kemudian perlu dipahami bahwa Kewajiban ada di tangan pemerintah akan tetapi tanggungjawab berada di tangan semua komponen masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan adanya pembangunan pabrik batu gamping di desa Sampung Kecamatan Sampung Kab. Ponorogo, bahwa terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya dampak positif seperti batu mentah cepat laku, dan tidak ada musim sepi, dan menyerap lapangan kerja. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya bahan baku gamping mentah yang cepat habis, pencemaran udara disekitar lingkungan desa Sampung, sumber pangan/ perekonomian warga mati, sulitnya mendapatkan air bersih, pembatasan tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui dengan adanya pembangunan pabrik batu gamping di desa Sampung Kecamatan Sampung Kab. Ponorogo banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif, sehingga reaksi masyarakat menolak di banggunya pabrik tersebut karena banyak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat.

Konflik yang terjadi di masyarakat warga dan pelaku industri di desa Sampung sementara jika dianalisis, maka pendekatan teori yang digunakan adalah Teori konflik Ralf Dahrendorf untuk menganalisis tentang dampak pembangunan pabrik batu gamping terhadap lingkungan warga desa Sampung. Karena teori ini dianggap relevan dengan judul tersebut dimana dalam suatu masyarakat itu selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi secara terus menerus seperti penolakan warga dengan adanya pabrik tersebut ditunjukkan melalui aksi demo. Kekuasaan dan juga wewenang dapat merubah posisi atau struktur yang telah ada. Dari wewenang dan kekuasaan tersebut yang tidak berjalan dengan seimbang yang senantiasa membawa individu pada posisi atas dan posisi bawah yang akan menimbulkan dua golongan yang saling bertentangan yang mana golongan yang berkuasa ingin mempertahankan status quo sedangkan yang dikuasai ingin selalu mengalami perubahan. Dahrendorf membedakan golongan tersebut menjadi dua golongan yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan.

Pembangunan pabrik batu gamping ini dimana kekuasaan dan wewenang tidak berjalan dengan seimbang yang akhirnya menimbulkan dua golongan atau kelompok pertama yaitu kelompok yang mendukung (pro) dengan kelompok yang menolak (kontra) terhadap pembangunan pabrik batu gamping di desa Sampung tersebut.

- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68
- Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka 1994).hal.53
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 6
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), 129.
- Haris Herdiyansyah, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 118
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D cetakan XXI* (Bandung: Alfabet, 2014), 277.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hal 288-289.

